



## Implementasi Good Governance dalam Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Cimahi Tengah

Lena Oktaviani <sup>1)</sup>; Kurhayadi <sup>2)</sup>; Rezky Afihtul Barokah <sup>3)</sup>

<sup>1)</sup>Study Program of Public Administration, STIA Bandung

Email: <sup>1)</sup> [lenaoktaviani2510@gmail.com](mailto:lenaoktaviani2510@gmail.com) ; <sup>2)</sup> [kurhayadi@stiabandung.ac.id](mailto:kurhayadi@stiabandung.ac.id) ; <sup>3)</sup> [barokahra@stiabandung.ac.id](mailto:barokahra@stiabandung.ac.id)

### ARTICLE HISTORY

Received [04 Juli 2023]

Revised [08 November 2023]

Accepted [09 Desember 2023]

### KEYWORDS

good governance, employee performance

This is an open access article under the [CC-BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license



### ABSTRAK

Pemerintah memiliki peran dalam penerapan good governance yang dalam pengambilan keputusan sangatlah penting, praktek-praktek good governance mampu diterapkan, sehingga masyarakat dapat ikut berpartisipasi mengenai good governance dalam kinerja pegawai di kantor Kecamatan Cimahi Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan cara yaitu menggambarkan masalah-masalah yang sinergis saat penelitian dilakukan. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan observasi, wawancara, dokumen dan Studi literatur . Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah lembar observasi, lembar wawancara, dan dokumentasi terstruktur yang dibuat sendiri oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan implementasi good governance dalam kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Cimahi Tengah telah sesuai dengan kebijakan dan standar good governance yang ada hal ini terlihat dari bagaimana kinerja pegawai dan juga kepuasan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan.

### ABSTRACT

The government has a role in the implementation of good governance that in decision making is very important, good governance practices are able to be implemented, so that people can participate in Good Governance in employee performance at the Central Cimahi Sub-district Office. This research uses qualitative research method by the way of illustrating the synergistic problems when the research is done. Data collection techniques performed with observations, interviews and documents. The instrument used in this research is observation sheet, interview sheet, and structured documentation made by the researcher. The results showed that the implementation of good governance in employee performance at the Central Cimahi Sub-district office has been in accordance with the goods of good governance policies and this is seen from how employee performance and community satisfaction in providing services.

## PENDAHULUAN

Di era demokrasi saat ini, masyarakat Indonesia dapat secara bebas berpendapat dan mengontrol kebijakan pemerintah. Namun kebebasan yang diberikan merupakan salah satu faktor pemicu masyarakat dalam menuntut pemerintah agar dapat bekerja dengan semestinya. Salah satu upaya pemerintah menghadapi berbagai tuntutan publik adalah dengan menjalankan visi dan misi pemerintahannya serta berkomitmen yang tinggi guna untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan bangsa bernegara. Demi mewujudkan penyelenggaraan pemerintah yang baik maka pemerintah mencoba mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa atau dikenal dengan istilah good governance. Good governance menuntut keseimbangan peran antar seluruh unsur pendukungnya, yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat (Suharyanto, 2016:124).

Good governance merupakan wujud dari penerimaan akan pentingnya suatu perangkat peraturan atau tata kelola yang baik untuk itu prinsip-prinsip Good Governance menjadi sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Berawal dari arti good governance maka perlu penyediaan informasi yang relevan dan menggambarkan kinerja (performance) sektor publik yang sangat penting dalam memberikan pertanggung jawaban akan segala aktivitasnya kepada semua pihak yang berkepentingan (Daempal, Saerang & Untu, 2022:1752). Mewujudkan good governance tentunya memiliki banyak hal dan banyak cara diperlukan dilaksanakan, dan terwujud dalam kinerja pegawai yang dapat memahami nilai-nilai dan tradisi aparatur administrasi pemerintahan mencirikan praktik tata kelola yang baik, dan tata pemerintahan yang baik sangat membutuhkan perubahan menyeluruh di semua elemen lembaga yang terlibat dalam praktik tata pemerintahan yang baik antara lain pemerintah sebagai perwakilan negara, yaitu pasar dan pelaku usaha, serta masyarakat sipil sehingga semua dapat memainkan peran yang saling melengkapi dan optimal dalam untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dengan mempertimbangkan pembangunan yang baik pemerintahan memiliki kompleksitas yang tinggi dan kendala yang besar, maka perlu langkah strategis untuk memulai reformasi praktik tata kelola yang baik dan pembangunan good governance akan lebih mudah jika dimulai dari sektor pelayanan publik daerah (Dumbi, Arman & Dunggjo, 2022:93).

Implementasi pelaksanaan nilai-nilai good governance menjadi unsur penting dalam mendukung terwujudnya tujuan pemerintahan daerah diantaranya kinerja di kecamatan. Kecamatan menjadi salah

satu bagian sistem pelayanan publik kepada masyarakat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengambil penelitian tentang Implementasi Good Governance dalam Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Cimahi tengah.

Pada penelitian ini, penulis mencoba melihat sejauh mana pelaksanaan prinsip-prinsip good governance yang ada di kecamatan Cimahi Tengah dimana pada kenyataannya hingga saat ini Masih terdapat keluhan dari masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan belum cukup baik Terutama dalam bersosialisasi dengan masyarakat, yang menjadi faktor penghambat dalam penerapan implementasi good Governance di Kecamatan Cimahi tengah adalah masih kurangnya tenaga kerja. Dari masalah tersebut penulis menyimpulkan bahwa pelaksanaan prinsip-prinsip good governance di Kantor kecamatan Cimahi Tengah belum maksimal khususnya dari segi keterbukaan.

## LANDASAN TEORI

Good Governance adalah tata kelola pemerintahan yang baik yang telah didefinisikan oleh berbagai lembaga yang diakui oleh dunia. Salah satu lembaga tersebut yaitu United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen kebijakannya yang berjudul "Governance for sustainable human development" mendefinisikan good governance sebagai hubungan yang sinergis dan konstruktif di antar negara, sektor swasta, dan society.

Menurut Mardiasmo (2018 : 23) yang dikutip dari World Bank mengungkapkan bahwa Good governance adalah : "Suatu pelaksanaan manajemen dalam suatu pembangunan yang solid dan bertanggungjawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien. Penghindaran salah dalam alokasi dan investasi, serta pencegahan korupsi secara politik dan administratif. Menjalankan disiplin anggaran untuk menciptakan legal and political framework bagi tumbuhnya suatu aktivitas-aktivitas dalam dunia usaha."

Menurut United Nation Development Programme (UNDP) dalam Mardiasmo (2018) terdapat prinsip Good Governance, yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efesiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik.

Kinerja karyawan adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang dalam suatu organisasi, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal dan tidak melanggar sesuai moral dan etika (Oktavian et al. 2022).

Menurut Mangkunegara (2017) yang dimaksud kinerja (performance) adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang karyawan dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggungjawab yang diberikan kepadanya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja karyawan Menurut Mangkunegara (2017) diantaranya Faktor kemampuan secara psikologis, Faktor motivasi terbentuk dari sikap (attitude) seorang pegawai dalam menghadapi situasi kerja.

Penelitian terkait yang pertama dilakukan oleh Bambang Jatmiko dan Eliza Damayanti pada tahun 2020 dengan judul Dampak Good Government Governance terhadap Kinerja Value For Money Method pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. Penelitian terkait bertujuan untuk menguji dan membuktikan secara empiris dampak Good Government Governance yang terdiri dari Transparansi, Akuntabilitas, dan Aturan Hukum terhadap Kinerja Value for Money pada Unit Kerja Daerah (SKPD) di Kabupaten Kebumen. Metode penelitian dalam penelitian terkait menggunakan teknik purposive sampling yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu. Hasil pengujian menunjukkan bahwa sebagian transparansi dan aturan hukum memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap ekonomi,efisiensi, dan efektivitas, sedangkan akuntabilitas tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Penelitian terkait yang kedua dilakukan oleh Rosen Heluka, Victor Pattiasina dan Entar Sutisman pada tahun 2022 yang berjudul Dampak Penerapan Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. Penelitian ini menguji pengaruh penerapan good governance, sistem informasi akuntansi, dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja instansi pemerintah kabupaten Yahokimo. Pengujian dilakukan terhadap sampel sebanyak 97 responden. Metode sampel yang digunakan adalah purposive sampling. Pengumpulan data dilakukan dengan survei langsung. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan good governance berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja instansi Pemerintah Kabupaten Yahokimo.

Berdasarkan penelitian terkait diatas, terdapat perbedaan dan persamaan dengan penelitian yang sedang dilakukan. Persamaan antara kedua penelitian terkait dengan penelitian ini ada pada metode penelitian yang sama-sama menggunakan pendekatan kualitatif sebagai metode. Adapun perbedaan antara penelitian terkait dengan penelitian saat ini terdapat pada lokus penelitian, subjek dan objek dari penelitian.



## METODE PENELITIAN

### Metode Analisis

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif kualitatif. Dalam penelitian kualitatif peneliti melakukan penelitian dengan cara yaitu menggambarkan masalah-masalah yang sinergis saat penelitian dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan secara riil dan konkrit sesuai dengan apa yang ditemukan di lapangan kemudian menganalisisnya dengan objektif berkaitan dengan implementasi good governance dalam kinerja pegawai pada kantor Kecamatan Cimahi Tengah.

Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Cimahi tengah, Kota Cimahi yang berlokasi di Jl. Terusan No.44, Cimahi, Kec. Cimahi Tengah, Kota Cimahi, Jawa Barat 40522. Waktu penelitian ini dilakukan selama 1 (satu) bulan yakni pada bulan April-Mei 2023. Sumber data pada penelitian ini adalah Sumber data lisan dan sumber data tertulis. Data lisan diperoleh dari Pegawai Kantor Kecamatan Kecamatan Cimahi Tengah yang terlibat langsung dalam pelaksanaan implementasi good governance tersebut, dan juga dari masyarakat yang menerima pelayanan publik. Adapun data tertulis diperoleh dari dokumen-dokumen yang dimiliki oleh pemerintah daerah seperti profil Kecamatan Kecamatan Cimahi Tengah dan dokumentasi yang berupa gambar, juga beberapa arsip kegiatan Kecamatan Kecamatan Cimahi Tengah. Informan yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah Pegawai Kecamatan Cimahi Tengah seperti Camat, Sekretaris, Kepala Seksi Sarana Prasarana, Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Tenaga Harian Lepas (THL) dan masyarakat.

Sesuai dengan karakteristik yang diperlukan untuk penelitian ini, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah : Observasi, Wawancara, Dokumen, dan Studi Literatur. Teknik Analisis data yang di gunakan adalah : reduksi data, penyajian data, penarik kesimpulan. Instrumen Pengumpulan Data yang digunakan adalah : Lembar observasi, Pedoman Wawancara, Pedoman penelusuran dokumen. Teknik Keabsahan data dalam penelitian ini menggunakan teknik triangulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding memanfaatkan terhadap data itu (Ulfatin, 2022:276). Triangulasi teknik untuk menguji kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data diperoleh melalui wawancara, kemudian dicek dengan observasi, dokumentasi, atau kuisisioner.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Lembaga administrasi negara menyimpulkan bahwa wujud good governance adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggungjawab, serta efisien dan efektif, dengan menjaga “kesinergisan” interaksi yang konstruksi diantara domain-domain negara, sektor swasta dan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara didunia yang sedang berjuang dan mendambakan terciptanya good governance. Namun, keadaan-keadaan saat ini belum menunjukkan bahwa hal tersebut masih sangat jauh dengan harapan.

Kepentingan politik, KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) Peradilan yang tidak adil, bekerja diluar wewenang kurangnya integritas adalah beberapa masalah yang membuat pemerintahan yang baik masih belum bisa tercapai untuk mencapai good governance dalam tata pemerintahan. Maka prinsip-prinsip good governance hendaknya ditegakkan atau diterapkan dalam berbagai institusi pemerintahan. Ada beberapa pendapat mengenai prinsip-prinsip good governance menurut United Nation Development Programme (UNDP), dalam Mardiasmo (2018), yaitu (1) partisipasi, (2) kepastian hukum, (3) transparansi, (4) tanggung jawab, (5) berorientasi pada kesepakatan, (6) keadilan, (7) efektifitas dan efesiensi, (8) akuntabilitas, (9) visi strategik.

Dari delapan indikator mengenai prinsip-prinsip good governance diatas, penulis hanya menggunakan empat (4) indikator sebagai dasar untuk melihat bagaimana implementasi good governance dalam kinerja pegawai pada kantor kecamatan cimahi tengah, yaitu :

1. Akuntabilitas
2. Transparansi
3. Keterbukaan
4. Aturan Hukum

### Implementasi good governance dalam kinerja pegawai pada kantor kecamatan cimahi tengah, mengacu pada Prinsip- Prinsip Good Governance

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas menurut UNDP merupakan suatu tanggung jawab pemerintah kepada publik sama halnya kepada stakeholders. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti terhadap Bapak

Hadi selaku PNS Kantor Kecamatan Cimahi Tengah, beliau menyatakan bahwa penerapan prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan sangat baik di kantor kecamatan karena Kantor Kecamatan Cimahi Tengah telah memberikan penjelasan atau rincian setiap persyaratan-persyaratan kelengkapan dokumen pemberian layanan sebagai bentuk pertanggung jawaban pemerintah kepada masyarakat.

## 2. Transparansi

Transparansi menurut UNDP memiliki pengertian bahwa pemerintah terbuka mengenai segala informasi yang ada pada pemerintahan kepada masyarakat. Berdasarkan hal tersebut, Kantor Kecamatan Cimahi Tengah telah melakukan transparansi dalam hal anggaran dana daerah dimana pada setiap kelurahan telah membuat rincian anggaran keuangan dana desa yang telah ditempelkan pada banner dengan sangat jelas dan rinci sehingga masyarakat dapat mengerti rincian pengeluaran dan penerimaan dana desa. Kantor Kecamatan Cimahi Tengah juga telah memberikan informasi yang lengkap mengenai pelayanan pada Kantor Kecamatan Cimahi Tengah dan penjelasan mengenai setiap berkas yang diperlukan untuk mengurus kebutuhan masyarakat, info, dan agenda Kantor Kecamatan Cimahi Tengah dengan lengkap. Kantor Kecamatan Cimahi Tengah juga telah memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan cepat dan tepat waktu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kantor Kecamatan Cimahi Tengah membutuhkan waktu paling lambat 14 hari kerja dengan catatan bahwa tidak ditemukan kendala jaringan dan jika tidak terdapat kendala apapun KTP bisa langsung jadi. Pelayanan dalam membuat Kartu Surat Keluarga (KSK) membutuhkan waktu 1 bulan, mengurus surat pindah keluar dan datang membutuhkan waktu paling lambat 1 hari, untuk membuat surat akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, dan akta perceraian waktu dan biaya tergantung dari peraturan yang berlaku di Dispendukcapil. Pemerintah Kecamatan Cimahi Tengah juga memiliki komunikasi yang sejalan antara pimpinan dan bawahan sebagai bentuk penerapan prinsip transparansi di Kantor Kecamatan Cimahi Tengah sehingga tidak terdapat hambatan dalam jalannya pemerintahan.

## 3. Keterbukaan

Keterbukaan yaitu menghendaki terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan. Indikator ini menjelaskan bahwa bagaimana pemerintah menghendaki terbukanya atau memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memberikan suatu masukan, tanggapan kritik dan saran serta pendapatnya mereka sendiri terhadap instansi-instansi yang dinilai transparan. Untuk mengetahui bagaimana pendapat atau suatu keterbukaan masyarakat terhadap suatu pelayanan, peneliti melakukan wawancara dengan salah satu masyarakat yang mengatakan bahwa masih perlu peningkatan dari segi pelayanan yang dilakukan oleh para pegawai-pegawai Kecamatan Cimahi Tengah, terutama dalam rangka lebih bisa bersosialisasi dengan masyarakat untuk lebih bisa melakukan pendekatan untuk memaparkan aturan-aturan yang dikeluarkan oleh pihak Kecamatan Cimahi Tengah tersebut. Kemudian masyarakat juga berhak melakukan atau mengemukakan keluhan-keluhan apabila terjadi suatu kelalaian dari pihak Kecamatan Cimahi Tengah.

## 4. Aturan Hukum

Aturan Hukum Menurut UNDP memiliki pengertian bahwa aturan hukum dan undang-undang harus memiliki keadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh, terutama aturan hukum mengenai hak asasi manusia. Dasar hukum yang digunakan oleh Kecamatan Cimahi Tengah yaitu Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 2019 Tentang Penilaian kinerja PNS, Peraturan Wali Kota Cimahi No. 32 Tahun 2021 Tentang Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah.

## **Faktor Penghambat dalam penerapan implementasi good Governance dalam kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Cimahi Tengah**

Pada penerapan good governance dalam kinerja pegawai dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hambatan baik itu kualitas pegawai sampai kuantitas pegawai merupakan faktor yang dapat menjadi penghambat dalam pelaksanaan penerapan good governance hal ini selaras dengan pernyataan informan, yaitu :

Pegawai PNS sebanyak 21 orang dan THL sebanyak 15 orang. Sampai saat ini kualitas pegawai dirasa masih dirasa kurang, karena hanya sebagian pegawai saja yang sesuai harapan karena berbagai hal, salah satunya tidak adanya kompetensi peningkatan kapasitas pegawai dari leading sektor karena penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas itu kewajiban dr leading sektor bukan dari kecamatan/kelurahan. Dan untuk sampai saat ini kecamatan/kelurahan sangat2 kurang jumlah pegawainya, bahkan ada 1 seksi yang tidak mempunyai staf pns sama sekali. Dan untuk kesesuaian pendidikan Di kecamatan/kelurahan masih jauh juga dari kata ideal karena faktor penempatan pegawai itu sendiri,



penempatan pegawai adalah ranah BKPSDMD, ditambah faktor perjanjian pegawai di awal menjadi CPNS yg bersedia di tempatkan dimana saja, jadi PNS harus selalu siap sesuai perintah pimpinan ditempatkan dimana saja walaupun tidak linier (sesuai jenjang pendidikan). Sangat berpengaruh terhadap kinerja pegawai, dan penerapan implementasi good Governance sangat dibutuhkan dalam instansi/kantor. Untuk membuat kinerja para pegawai semakin teliti, bagus dan mendapatkan hasil yang memuaskan. Selama ini untuk kinerja pegawai dalam memberikan pelayanan bersifat tanggap tetapi terkadang masih terdapat keluhan seperti pelayanan yang kurang cepat kurang baik. Pada intinya pelayanan yang diberikan sudah sesuai dan normal dan juga ada batasan aturannya. Secara umum selama masyarakat tidak komplain dengan Kecamatan Cimahi tengah berarti Kecamatan Cimahi tengah sudah menjalankan sesuai dengan keinginan masyarakat sesuai dengan aturannya. (CL.C.S.KS.KP.P.T. Obs) Berdasarkan hasil wawancara dan observasi tersebut, faktor penghambat dalam penerapan good governance dalam kinerja pegawai adalah kurangnya tenaga kerja untuk beberapa sektor di kecamatan Cimahi Tengah selain itu kesesuaian pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam kinerja pegawai karena pegawai akan cepat melakukan pekerjaannya apabila pekerjaan tersebut sesuai dengan kemampuan pegawai tersebut. Oleh karena itu, kuantitas pegawai dan kualitas pegawai di kecamatan Cimahi Tengah dinilai masih kurang cukup dalam pelaksanaan penerapan good governance. Selain kualitas dan kuantitas pegawai faktor lain yang dapat menghambat pelaksanaan penerapan good governance adalah perilaku pegawai dalam melaksanakan tugas apakah pegawai tersebut siap dan sigap dalam melaksanakan tugas atau tidak yang mana hal itu dapat menimbulkan dampak negatif apabila tidak diperhatikan dengan baik. Hal ini senada dengan pernyataan informan, yaitu :

Kesiapan good governance sangat siap, dan harus selalu siap asal ditunjang dengan kompetensi peningkatan kapasitas pegawai. Masyarakat harus minat dan ber antusias. Misalnya dalam masalah dokumen kependudukan itu sudah menjadi kewajiban sebagai warga negara, dan jika mau tidak mau itu memang harus dituntut untuk mengurus dokumen kependudukan mulai dari akta, SKU dan berantusias jika ada gebyar misal seperti pembuatan akta gratis. Jika terdapat komplain itu ada tetapi kebanyakan bersifat subjektif dari sikap, dan kalau untuk aturan sudah dijalankan sesuai dengan aturannya. Banyak nya komplain itu dari sikap pegawai tetapi secara individu bukan secara instansi seperti di bagian pelayanan misalnya tidak bisa menyembunyikan raut muka atau bersikap tidak ramah. Seharusnya tidak boleh seperti itu dalam pelayanan dan harus tetap tersenyum dan mencoba untuk tetap bersikap ramah terhadap masyarakat. Kalau untuk masalah kerjaan sudah sesuai dengan aturan. Untuk perbedaannya jika yang mempunyai jabatan biasanya langsung diarahkan/diserahkan kepada pimpinan, untuk perihal dokumen itu tetap dilalui, diikuti tidak serta merta langsung tanpa dokumen. Dan untuk pelayanan istimewa itu ada, dan pihak Kecamatan Cimahi tengah pun memberikan kejelasan dengan orang yang bersangkutan siapapun itu pejabatnya. Jadi kalau untuk perbedaan pelayanan yang memiliki jabatan itu ada tetapi meskipun ada juga tetap dilayani dengan standar sama seperti masyarakat lain pada umumnya. (CL.C.S.KS.KP.P.T. Obs)

Berdasarkan hasil penelitian dan observasi tersebut, pegawai kantor Kecamatan Cimahi Tengah dinilai telah siap dengan penerapan good governance meskipun saat pelaksanaan masih terdapat keluhan dari masyarakat yang dimana hal ini disebabkan oleh kurangnya tenaga kerja sehingga keluhan tersebut timbul. Karena kesiapan dan kesiapan kecamatan Cimahi Tengah pula masyarakat antusias dalam pelayanan karena pegawai tidak membedakan pelayanan antara masyarakat dan orang yang memiliki jabatan.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

1. Akuntabilitas yang dilakukan oleh pihak kecamatan Cimahi Tengah dalam Hal memberikan penjelasan atau setiap persyaratan-persyaratan kelengkapan dokumen itu sudah cukup baik.
2. Transparansi yang dilakukan oleh pihak kecamatan Cimahi Tengah mengenai anggaran dana daerah dikatakan sudah cukup baik, dimana pada setiap kelurahan telah membuat rincian anggaran keuangan dana desa yang telah ditempelkan pada banner dengan sangat jelas dan rinci sehingga masyarakat dapat mengerti rincian pengeluaran dan penerimaan dana desa. dan memberikan informasi yang lengkap mengenai pelayanan pada Kantor Kecamatan Cimahi Tengah dan penjelasan mengenai setiap berkas yang diperlukan untuk mengurus kebutuhan masyarakat, info, dan agenda Kantor Kecamatan Cimahi Tengah dengan lengkap.
3. Keterbukaan, kembali lagi kepada masyarakat yang bersangkutan agar bisa mendatangi secara langsung Kantor Kecamatan Cimahi Tengah apabila ada suatu keluhan-keluhan yang terjadi, berikan suatu masukan atau tanggapan yang perlu untuk ditanggapi, terkhusus bagi masyarakat yang mengalami hal tersebut.

4. Aturan hukum, pemerintahan yang baik mempunyai karakteristik berupa jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh. Pihak kecamatan Cimahi Tengah telah menjalankan semua aturan yang berlaku.

Dilihat dari segi Faktor Penghambat dalam penerapan implementasi good Governance dalam kinerja pegawai di Kantor Kecamatan Cimahi Tengah, kualitas pegawai masih dirasa kurang, karena hanya sebagian pegawai saja yang sesuai harapan karena berbagai hal, salah satunya tidak adanya kompetensi peningkatan kapasitas pegawai dari leading sektor karena penyelenggara kegiatan peningkatan kapasitas itu kewajiban dari leading sektor bukan dari kecamatan/kelurahan.

### Saran

1. Diharapkan kepada Pihak Kecamatan Cimahi Tengah untuk mengevaluasi kinerja pegawai terutama sikap dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Agar tidak ditemukan lagi sikap diskriminasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dan kepada masyarakat untuk berpartisipasi dalam meningkatkan pelayanan publik di Kecamatan Cimahi Tengah, dalam bentuk yang paling sederhana misalnya masyarakat menyampaikan keluhan mengenai pelayanan publik di Kecamatan Cimahi Tengah melalui kotak saran atau kepada petugas pelayanan secara langsung.
2. Diharapkan kepada Pihak Kecamatan Cimahi Tengah untuk bisa lebih bersosialisasi dengan masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.
3. Perlunya penambahan jumlah pegawai terutama pegawai PNS dimana hal tersebut akan meningkatkan leading sektor yang kekurangan tenaga kerja, Sehingga masyarakat merasa cukup dan tidak mengeluh dengan pelayanan yang diberikan oleh pihak Kecamatan Cimahi tengah dikarenakan adanya penambahan jumlah pegawai.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggoro, A. (2021). Pengaruh Penerapan Prinsip-prinsip Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Terhadap Kinerja Anggaran Pada Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Jombang (Doctoral dissertation, UPN" VETERAN" JATIM).
- Jatmiko, B., & Lestiawan, H. Y. (2016). Good governance government and the effect on local government performance (survey on Gunung Kidul district government of Indonesia). *Repository Universitas Muhammadiyah Yogyakarta*, 14(14), 981-997.
- Daempal, A. V., Saerang, I. S., & Untu, V. N. (2022). Good Governance Dalam Meningkatkan Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Desa Boloak). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 10(4), 1751-1760.
- Dumbi, R., Arman, A., & Dunggio, S. (2022). Pengaruh Penerapan Good Governance Terhadap Kinerja Pegawai pada Kantor Kecamatan Bulila Kabupaten Gorontalo. *Provider Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 92-102.
- Mardiasmo. (2018). Perpajakan Edisi Terbaru 2018. *Journal of Chemical Information and Modeling*.
- Heluka, R., Pattiasina, V., Sutisman, E., Bonsapia, M., & Patiran, A. (2022). Dampak Penerapan Good Governance, Sistem Informasi Akuntansi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kinerja Instansi Pemerintah. *Journal of Business Application*, 1(1), 39-52.
- Oktavian, R. F., Satriawan, B., & Johan, A. (2022). Pengaruh kepemimpinan transformasional dan kepemimpinan diri terhadap kinerja adaptif selama krisis: Peran mediasi pemberdayaan psikologi. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, 4(8), 3402-3412.
- Suharyanto, A. (2016). Surat kabar sebagai salah satu media penyampaian informasi politik pada partisipasi politik masyarakat. *Jurnal Administrasi Publik (Public Administration Journal)*, 6(2), 123-136.
- Ulfatin, N. (2022). Metode penelitian kualitatif di bidang pendidikan: Teori dan Aplikasinya.
- Pane, V. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Kualitas Pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Toba.
- Pemerintah Pusat. (2009). Undang-undang (UU) tentang Pelayanan Publik. Tersedia di : <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38748/uu-no-25-tahun-2009>(21 November 2022)
- Warjiyati, S. (2018). Implementasi Prinsip-Prinsip Good Governance dalam Pelaksanaan Pemerintah di Indonesia. *Prosiding Konferensi Nasional Ke-8 Asosiasi Program Pascasarjana Perguruan Tinggi Muhammadiyah (APPPTMA)*, 64, 1-10.